

Studi Kajian Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pitri Br. Sitorus¹, Yusnita², M. Aga Ashari³, Rusiadi⁴, Dewi Mahrani Rangky⁵

Email: queenfitri36@gmail.com¹, yusnita2022@gmail.com², m.aga.ashari@gmail.com³, rusiadi@dosen.pancabudi.ac.id⁴, dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

Korespondensi penulis: queenfitri36@gmail.com

Abstract. This review study aims to analyze the realization of local government financing of Deli Serdang Regency. This study is a descriptive qualitative literature method through literature study, with the data used secondary data obtained from the Deli Serdang Central Bureau of Statistics. The study results explain that the government financing expenditure of Deli Serdang Regency from 2016 to 2022 has changed due to the different growth rates each year, seen from how much regional payment and regional financing are needed in that year. The development of government expenditure is the impact of national income growth. At the same time, federal income growth affects economic development, where economic development increases the population and public facilities also grow. And government spending affects the unemployment rate, where an increase in government spending reduces the unemployment rate in the region.

Keywords: Deli Serdang, Economic Development, Government Financing Realization

Abstrak. Studi kajian ini bertujuan menganalisis realisasi pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Studi ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan dengan data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Deli Serdang. Hasil kajian menerangkan bahwa pengeluaran pembiayaan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2016 sampai dengan 2022 mengalami perubahan dikarenakan laju pertumbuhan yang berbeda setiap tahun dilihat dari berapa banyak jumlah belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dibutuhkan pada tahun tersebut. Perkembangan pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari pertumbuhan pendapatan nasional sedangkan pertumbuhan pendapatan nasional berdampak dari pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi meningkatkan jumlah penduduk sehingga fasilitas publik yang disediakan juga semakin meningkat pula. Dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pengangguran dimana peningkatan pengeluaran pemerintah menurunkan tingkat pengangguran di wilayah itu.

Kata kunci: Deli Serdang, Pembangunan Ekonomi, Realisasi Pembiayaan Pemerintah

LATAR BELAKANG

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Berdasarkan Undang - undang No. 32 tahun 2004, memberikan defenisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membantu dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu good governance dan clean government. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Yuliarti, 2020). Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Manuaba et al., 2016).

Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk sesuatu tahun tertentu (Swaramarinda & Indriani, 2011). Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan public (PP No 58 Tahun 2005).

Saat ini penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih terbentur berbagai kendala di lapangan. Sehingga masih banyak entitas pemerintah yang masih menerapkan basis kas menuju akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan APBD tidak akan terlepas dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena hal ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ABPD serta untuk menyediakan suatu

laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu serta menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan layanan administratif dan infrastruktur publik melalui alokasi belanja daerah pada APBD. Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang - Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (Redaksi Great Publisher, 2009:206).

Komponen APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja, terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD tersebut berupaya mengelola setiap komponen dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (Jubir, 2022).

Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2, tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (back-bone) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya

publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan. Pelaksanaan APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul apabila terjadi surplus atau defisit.

KAJIAN TEORITIS

Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya menetapkan: Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Perda tersebut. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Anggaran Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2021) adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Mardiasmo, 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010:142) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Mardismo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010:280), laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif.

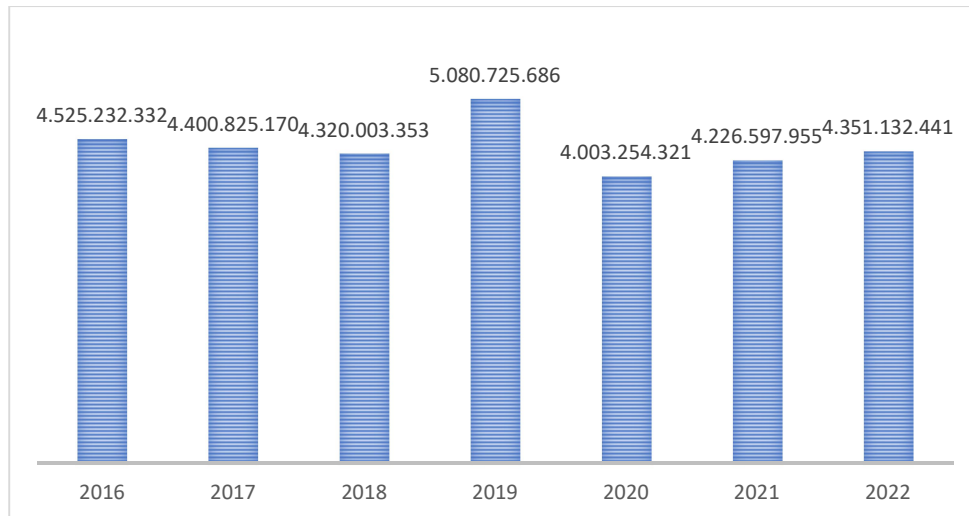
METODE PENELITIAN

Studi kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu (Kurniawan, 2014) yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan pemerintah daerah, juga melalui akses data-data yang diperoleh dari *website* sebagai publikasi informasi. Kajian deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan dan analisis data secara induktif (Sugiyono, 2012) sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti menarasikan hasil wawancara dan atau observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan realisasi anggaran terdiri atas tiga elemen (pos) utama. Pertama adalah pos pendapatan yang didalamnya terdiri dari item Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Kedua adalah belanja yang didalamnya terdiri dari item belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Ketiga adalah pembiayaan yang didalamnya terdiri dari item penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Realisasi pengeluaran pemerintah yang terdapat di kota Medan bisa dilihat dari data BPS, Data BPS menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Realisasi pembiayaan suatu daerah selalu dilihat dari berapa banyak jumlah belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dikeluarkan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut.



Sumber: BPS Kota Medan, 2020

Gambar 1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2022

Dari data yang dihasilkan di daerah Kabupaten Deli Serdang. Jumlah pengeluaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 adalah jumlah pengeluaran pemerintah paling rendah dalam 7 tahun terakhir yaitu berada pada angka 4.003.254.321 miliar rupiah menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2019 yang berada pada angka 5.080.725.686 miliar rupiah hal ini menurun dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada saat itu juga menurun dikarenakan di tahun 2020 kita dilanda oleh penyebaran virus Covid-19 yang membuat semua kegiatan perekonomian terganggu namun hal ini tidak berlangsung hingga masa ini dikarenakan pada tahun 2022 jumlah pengeluaran kabupaten Deli serdang sebesar 4.351.132.441 miliar rupiah hal ini dikarenakan meningkatnya belanja daerah dan pembiayaan daerah di kabupaten Deli Serdang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan analisis rasio pengeluaran pemerintah kabupaten Deli Serdang dari tahun 2016-2022 mengalami perubahan dikarenakan laju pertumbuhan yang berbeda setiap tahun dilihat dari berapa banyak jumlah

belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dibutuhkan pada tahun itu. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari pertumbuhan pendapatan nasional sedangkan pertumbuhan pendapatan nasional berdampak dari pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi meningkatkan jumlah penduduk sehingga fasilitas publik yang disediakan juga semakin meningkat pula. Dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dimana peningkatan pengeluaran pemerintah menurunkan tingkat pengangguran di wilayah itu.

Penulis memberi saran kepada pemerintah kabupaten Deli Serdang untuk terus memuat program atau kajian meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran serta melakukan efisiensi jumlah pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang dibutuhkan seperti meningkatkan fasilitas daerah, menanggulangi kemiskinan. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap agar dapat meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aritonang, Romaito dkk. 2023. *Studi Kajian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Mahasiswa Kreatif Vol. 1 (4) Hal. 245-252.
- Jubir, J. (2022). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu*. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis: Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0)*.
- Manuaba, I. B., Sutrisna, K. A., & Kartika, I. N. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(9), 960–992.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Rahayu, R. P. (2017). Analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 55–73.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(2), 95–105.
- Yuliarti, Y. (2020). Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 136–147.